



MEMORANDUM KOMITE PERENCANA  
BIDANG EKONOMI

## MEMORANDUM

---

**KEPADA** : GUBERNUR JAWA BARAT  
**DARI** : KOMITE PERENCANA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT  
**SUBJEK** : **REKOMENDASI MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS**  
**TANGGAL** : 14 NOVEMBER 2009  
**CC** : KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

---

Yth. Gubernur Jawa Barat,

Melalui memo ini kami sampaikan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif saja tidak cukup, perlu disertai dengan membaiknya distribusi pendapatan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan. Untuk itu pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk merancang upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimana ekonomi tumbuh mantap dan stabil diikuti dengan membaiknya distribusi pendapatan dan menurunnya kemiskinan.

### TUJUAN MEMO

Memo ini memberikan informasi bagaimana upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berkualitas. Upaya yang dimaksud merupakan terobosan berdasarkan pendekatan konsep PDRB sisi produksi maupun penggunaan, serta agregasi teori-teori sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian akan muncul sektor ekonomi apa yang dapat menjadi *prime mover* pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bagaimana meningkatkan produktivitas input sebagai komponen utama pembentuk pertumbuhan ekonomi.

## **PERMASALAHAN PEREKONOMIAN JAWA BARAT**

Wilayah Jabar terfragmentasi ke dalam wilayah industri dan pertanian yang secara eksplisit menunjukkan terjadinya dualistik ekonomi, yakni perekonomian modern bersanding dengan perekonomian tradisional. Sektor modern (industrialisasi) yang berkembang pesat namun terbatas di beberapa daerah dekat ibu kota negara, telah mendominasi perekonomian Jawa Barat, mendorong tingginya angka pendatang, menimbulkan *backwash effect* tabungan masyarakat ke Jakarta. Sementara mayoritas penduduk bergelut di sektor tradisional yakni pertanian skala kecil, lahan sempit, orientasi subsisten sehingga membentuk persentase tingginya penduduk miskin di perdesaan. Surplus TK dari sektor pertanian tidak terserap di sektor industri karena industri yang berkembang padat ilmu pengetahuan dan modal. Mereka yang keluar dari perdesaan atau sektor pertanian namun tidak memiliki akses terhadap kegiatan ekonomi produktif di perkotaan atau sektor non-pertanian melahirkan komunitas miskin pula di perkotaan. Dengan demikian dalam kondisi terfragmentasi terjadi korelasi komunitas miskin di perdesaan dengan di perkotaan.

Kesenjangan antara dominasi input dengan output berdampak pada perbedaan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan antar sektor ekonomi. Pekerja di sektor industri dan jasa cenderung memperoleh pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pekerja di sektor pertanian. Dengan demikian perbedaan produktivitas tersebut berdampak pada ketimpangan pendapatan. Selain ketimpangan pendapatan, terjadi puladisparitas pembangunan Jabar Utara-Selatan.

## **ANALISIS**

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai riil output agregat atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Berdasarkan pendekatan produksi, komponen PDRB mencakup 9 sektor ekonomi, sedangkan menurut pendekatan

penggunaan atau pengeluaran, PDRB merupakan penjumlahan dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah dan net ekspor.

Dalam literature tentang pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa pandangan terkait sumber pertumbuhan ekonomi yang sifatnya saling menguatkan. Menurut Solow Growth Theory, sumber pertumbuhan ekonomi adalah modal dan tenaga kerja. Sementara New Growth Theory menekankan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi karena adanya *human capital* dan *technological progress*. Model pertumbuhan ini menangkap peran ilmu pengetahuan dan ide-ide untuk mempercepat inovasi dan perubahan teknologi, dimana pemerintah harus mempercepat dan memperkuat kreativitas manusia, pasar modal berfungsi dengan baik dan menciptakan lingkungan yang kompetitif. Teori Pertumbuhan Regional mengelaborasi sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari inovasi dan entrepreneurship. Perspektif ekonomi kelembagaan mencermati bahwa kelembagaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekalipun teknologi tetap. Contoh kasus: pembagian kerja dapat meningkatkan efisiensi tanpa harus menambah sumberdaya maupun mengubah teknologi. Perlu dibangun kelembagaan ekonomi yang meminimalkan biaya transaksi, yakni regulasi yang menjamin kepastian pelaku ekonomi untuk melakukan pertukaran, memperkuat sistem penegakan jika terjadi masalah dalam proses transaksi. Demikian halnya kelembagaan informal yakni menghargai waktu, disiplin, kerja keras, jujur akan mempengaruhi produktivitas.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi seyogianya bisa mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

### **TEROBOSAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS**

Berdasarkan paparan masalah dan analisis di atas, mengerucut pada kebutuhan adanya prioritas sektor ekonomi yang diharapkan berdampak pada perbaikan distribusi pendapatan melalui peningkatan kualitas input sebagai

sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, yakni SDA, SDM, teknologi, finansial, infrastruktur, kelembagaan dan melalui upaya peningkatan investasi serta kebijakan anggaran. Oleh karena itu kami merekomendasikan terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sebagai berikut:

1. Sesuai hasil perhitungan dengan menggunakan Model SAM (Social Accounting Matrices) Jabar, prioritaskan pembangunan sektor pertanian, sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor bangunan dan sub sektor industri makanan dan minuman.
2. Mapping potensi detil dari kelima sektor tersebut dan klasifikasikan arah pengembangannya apakah pertumbuhan, perluasan atau penguatan di setiap wilayah.
3. Optimalkan pemanfaatan SDA, SDM, teknologi, finansial, infrastruktur untuk pembangunan kelima sektor tersebut disesuaikan dengan potensi wilayah.
4. Arahkan investasi swasta dan belanja pemerintah untuk mendorong pengembangan kelima sektor tersebut secara komprehensif. Untuk sektor yang swasta sudah menarik sehingga swasta berebutan masuk, pemerintah tak perlu lagi membelanjakan anggarannya agar tak terjadi *crowding out*. Alokasi anggaran pemerintah yang terbatas harus dilakukan tepat sasaran dan proporsional, lakukan kebijakan keuangan pro rakyat dengan melakukan evaluasi capaian target secara periodik.
5. Percepat reformasi birokrasi dan ubah mind set bahwa karya monumental tidak sebatas fisik, justru sebaiknya pada aspek non fisik.
6. Penguatan lembaga keuangan non-Bank, dan pendidikan kewirausahaan yang kuat.

## MEMORANDUM

---

**KEPADA** : GUBERNUR JAWA BARAT  
**DARI** : KOMITE PERENCANA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT  
**SUBJEK** : **REKOMENDASI PENCIPTAAN 1 JUTA LAPANGAN KERJA**  
**TANGGAL** : 25 AGUSTUS 2009  
**CC** : KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

---

Yth. Gubernur Jawa Barat, melalui memo ini kami sampaikan bahwa untuk menciptakan 1 juta lapangan kerja diperlukan arah kebijakan yang jelas mengingat kompleksitas permasalahan yang menyangkut lintas sektor dan wilayah.

### TUJUAN MEMO

Memo ini menawarkan terobosan yang dapat dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka menciptakan 1 juta lapangan kerja bagi masyarakat Jawa Barat, sebagai upaya penurunan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

### MASALAH KESEMPATAN KERJA

Struktur perekonomian Jawa Barat bercirikan dominasi industri pengolahan yang terkonsentrasi di beberapa daerah dan bersifat padat modal, sehingga terjadi ketimpangan sektoral dan wilayah yang disertai dengan tingginya pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, perekonomian Jawa Barat menghadapi ketimpangan kesempatan kerja antara kondisi riil, prospek dan perencanaan peningkatan ke depannya. Sampai saat ini jumlah tenaga kerja Jawa Barat mayoritas bergelut di sektor pertanian. Sementara prospek kesempatan kerja ke depannya berada di industri pengolahan. Menariknya, perencanaan peningkatan kesempatan kerja ke depan di sebagian besar daerah adalah industri kreatif.

## **ANALISIS**

Berdasarkan pendekatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja merupakan penambahan *demand* tenaga kerja baru karena adanya kegiatan ekonomi produktif atau pertumbuhan ekonomi naik, sehingga perencanaan tenaga kerja diawali dengan penentuan target pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini lazim digunakan termasuk dalam perencanaan di Jawa Barat. Berapa besar respon kebutuhan tenaga kerja ketika terjadi pertumbuhan ekonomi sangat tergantung karakteristik fungsi produksi output apakah padat modal atau padat karya. Pengangguran akan tinggi ketika terjadi gap yang lebar antara karakteristik fungsi produksi dengan ketersediaan SDM lokal.

Terdapat pendekatan lain yakni *manpower utilization approach* yang menempatkan tenaga kerja sebagai variabel independen bukan sebagai variabel dependen, sehingga perencanaan dimulai dengan pemanfaatan SDM dan SDA yang tersedia yang akan mendorong dan menentukan bentuk pertumbuhan ekonomi.

## **TEROBOSAN PENCIPTAAN 1 JUTA LAPANGAN KERJA**

Berdasarkan paparan masalah dan analisis di atas, kami merekomendasikan beberapa terobosan dalam rangka menciptakan 1 juta lapangan kerja sebagai berikut:

1. Dari aspek sumberdaya lokal, kabupaten/kota harus memiliki peta kepemilikan SDA, lapangan kerja, kekuatan SDM secara lengkap termasuk kelompok entrepreneur.
2. Dari aspek output, kabupaten/kota harus memiliki peta pasar output, asal bahan baku, prospek pasar.
3. Perencanaan kebutuhan capacity buliding sesuai potensi SDA dan SDM lokal serta tuntutan pasar output.
4. Provinsi memfasilitasi keterkaitan ekonomi dan role sharing antar daerah.

## MEMORANDUM

---

**KEPADA** : GUBERNUR JAWA BARAT  
**DARI** : KOMITE PERENCANA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT  
**SUBJEK** : **REKOMENDASI PENETAPAN PROYEKSI INDIKATOR  
MAKROEKONOMI TAHUN 2010**  
**TANGGAL** : 20 SEPTEMBER 2009  
**CC** : KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

---

Yth. Gubernur Jawa Barat, melalui memo ini kami sampaikan pentingnya penetapan indikator makroekonomi baik besaran maupun arahnya sebagai landasan pijakan perumusan perencanaan kegiatan pembangunan tahunan setiap OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

### TUJUAN MEMO

Memo ini memberikan informasi proyeksi besaran indikator makroekonomi Jawa Barat untuk tahun 2010 sebagai pegangan pihak terkait dalam membuat rencana kegiatan pembangunan tahun 2010. Proyeksi yang dimaksud mencakup 4 indikator utama makroekonomi daerah yakni pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi dan investasi.

### PERMASALAHAN MAKROEKONOMI JAWA BARAT

Pada triwulan akhir tahun 2008 makroekonomi Jawa Barat menghadapi tekanan seiring dengan terjadinya krisis ekonomi global. Melemahnya daya beli masyarakat negara-negara yang terkena krisis berdampak pada menurunnya ekspor manufaktur Jawa Barat, sehingga menurunkan tingkat produksi sektor industri pengolahan yang selama ini merupakan sektor dominan dalam struktur PDRB Jawa Barat. Kondisi usaha yang kurang menguntungkan tersebut menahan rencana realisasi investasi dan dikhawatirkan menurunkan pemanfaatan tenaga

kerja. Sejalan dengan pulihnya ekonomi dunia, dan asumsi kondisi lain *ceteris paribus* (tidak berubah) diperkirakan pada tahun 2010 kondisi makroekonomi Jawa Barat menjadi lebih baik. Hanya saja besaran angka proyeksi perlu diluweskan dengan memperbesar angka toleransi mengingat Jawa Barat belum memiliki model makroekonomi yang komprehensif lintas sektor dan wilayah.

### PROYEKSI MAKROEKONOMI JAWA BARAT TAHUN 2010

Tabel di bawah ini menginformasikan proyeksi indikator makroekonomi Jawa Barat pada tahun 2010 beserta faktor-faktor determinannya.

No	Indikator	Tahun 2009		Tahun 2010		Faktor Determinan
		Nasional	Jawa Barat	Nasional	Jawa Barat	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.5 - 4.5	3.5 - 4.5	<b>4.5 - 5.5</b>	<b>4.7 - 5.7</b>	Membaiknya ekonomi global: ekspor meningkat, sektor dominan membaik  Bertahannya kapasitas ekonomi domestik Jabar: stabilitas sektor pertanian dan PHR  Meningkatnya konsumsi rumah tangga
2	Inflasi (%)	5.0 - 7.0	3.75 - 4.75	<b>6.0 - 7.0</b>	<b>5.0 - 6.0</b>	Permintaan meningkat, pengaruh eksternal (harga minyak, komoditas pertanian)
3	Investasi (PMTB harga berlaku) trilyun rupiah		103.75 - 109.21		<b>116.65 - 122.79</b>	Kondisi usaha membaik
4	Pengangguran (%)	8.14	11.85	7.9 - 8.1	10.5 - 11	Pertumbuhan ekonomi meningkat yang diperkuat oleh berkembangnya kegiatan ekonomi lokal

Data di atas dari berbagai sumber yang validasinya diragukan. Angka proyeksi pertumbuhan ekonomi dan investasi diperoleh berdasarkan trend nya yang ternyata telah menunjukkan perilaku siklikalnya. Disayangkan data PDRB Jawa Barat sebagai penentu besaran pertumbuhan ekonomi tidak persis merupakan agregasi nilai kabupaten/kota, karena BPS survey terbatas pada beberapa sampel di kabupaten/kota tertentu.

### **REKOMENDASI PENETAPAN PROYEKSI INDIKATOR MAKROEKONOMI KE DEPAN**

Untuk penetapan proyeksi indikator makroekonomi dengan mempertimbangkan banyak aspek termasuk peranan kabupaten/kota dan pengaruh kebijakan tertentu, maka ke depannya perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

- Mendorong kabupaten/kota agar concern dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi daerahnya dan besarnya kontribusi sektoral dan wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
- Mengklasifikasikan kabupaten/kota berdasarkan LPE, kontribusi PDRB, investasi dan potensi masing-masing daerah, yang akan mempermudah dalam mengarahkan kebijakan penanganan setiap kabupaten/kota menuju wilayah unggulan berbasis sumberdaya lokal.
- Memanfaatkan event Musrenbangda Jawa Barat sebagai media koordinasi pembahasan indikator makroekonomi Jawa Barat, dengan mengubah format musrenbangda dari shopping list menjadi mengait ke sistem perencanaan.
- Membentuk forum penetapan indikator makroekonomi Jawa Barat yang melibatkan pihak terkait lintas pelaku dan daerah.

- Membangun Model Makroekonomi Jawa Barat yang bersifat dinamis dan komprehensif mencakup perilaku produksi dan konsumsi baik pemerintah maupun swasta dan rumah tangga.
- Mempersiapkan piranti untuk penyusunan model terutama ketersediaan data base yang terkait dengan variabel pembangunan ekonomi.

## MEMORANDUM

---

**KEPADA** : GUBERNUR JAWA BARAT  
**DARI** : KOMITE PERENCANA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT  
**SUBJEK** : **REKOMENDASI MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS**  
**TANGGAL** : 14 NOVEMBER 2009  
**CC** : KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

---

Yth. Gubernur Jawa Barat,

Melalui memo ini kami sampaikan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif saja tidak cukup, perlu disertai dengan membaiknya distribusi pendapatan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan. Untuk itu pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk merancang upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimana ekonomi tumbuh mantap dan stabil diikuti dengan membaiknya distribusi pendapatan dan menurunnya kemiskinan.

### TUJUAN MEMO

Memo ini memberikan informasi bagaimana upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berkualitas. Upaya yang dimaksud merupakan terobosan berdasarkan pendekatan konsep PDRB sisi produksi maupun penggunaan, serta agregasi teori-teori sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian akan muncul sektor ekonomi apa yang dapat menjadi *prime mover* pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bagaimana meningkatkan produktivitas input sebagai komponen utama pembentuk pertumbuhan ekonomi.

## **PERMASALAHAN PEREKONOMIAN JAWA BARAT**

Wilayah Jabar terfragmentasi ke dalam wilayah industri dan pertanian yang secara eksplisit menunjukkan terjadinya dualistik ekonomi, yakni perekonomian modern bersanding dengan perekonomian tradisional. Sektor modern (industrialisasi) yang berkembang pesat namun terbatas di beberapa daerah dekat ibu kota negara, telah mendominasi perekonomian Jawa Barat, mendorong tingginya angka pendatang, menimbulkan *backwash effect* tabungan masyarakat ke Jakarta. Sementara mayoritas penduduk bergelut di sektor tradisional yakni pertanian skala kecil, lahan sempit, orientasi subsisten sehingga membentuk persentase tingginya penduduk miskin di perdesaan. Surplus TK dari sektor pertanian tidak terserap di sektor industri karena industri yang berkembang padat ilmu pengetahuan dan modal. Mereka yang keluar dari perdesaan atau sektor pertanian namun tidak memiliki akses terhadap kegiatan ekonomi produktif di perkotaan atau sektor non-pertanian melahirkan komunitas miskin pula di perkotaan. Dengan demikian dalam kondisi terfragmentasi terjadi korelasi komunitas miskin di perdesaan dengan di perkotaan.

Kesenjangan antara dominasi input dengan output berdampak pada perbedaan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan antar sektor ekonomi. Pekerja di sektor industri dan jasa cenderung memperoleh pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pekerja di sektor pertanian. Dengan demikian perbedaan produktivitas tersebut berdampak pada ketimpangan pendapatan. Selain ketimpangan pendapatan, terjadi puladisparitas pembangunan Jabar Utara-Selatan.

## **ANALISIS**

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai riil output agregat atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Berdasarkan pendekatan produksi, komponen PDRB mencakup 9 sektor ekonomi, sedangkan menurut pendekatan

penggunaan atau pengeluaran, PDRB merupakan penjumlahan dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah dan net ekspor.

Dalam literature tentang pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa pandangan terkait sumber pertumbuhan ekonomi yang sifatnya saling menguatkan. Menurut Solow Growth Theory, sumber pertumbuhan ekonomi adalah modal dan tenaga kerja. Sementara New Growth Theory menekankan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi karena adanya *human capital* dan *technological progress*. Model pertumbuhan ini menangkap peran ilmu pengetahuan dan ide-ide untuk mempercepat inovasi dan perubahan teknologi, dimana pemerintah harus mempercepat dan memperkuat kreativitas manusia, pasar modal berfungsi dengan baik dan menciptakan lingkungan yang kompetitif. Teori Pertumbuhan Regional mengelaborasi sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari inovasi dan entrepreneurship. Perspektif ekonomi kelembagaan mencermati bahwa kelembagaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekalipun teknologi tetap. Contoh kasus: pembagian kerja dapat meningkatkan efisiensi tanpa harus menambah sumberdaya maupun mengubah teknologi. Perlu dibangun kelembagaan ekonomi yang meminimalkan biaya transaksi, yakni regulasi yang menjamin kepastian pelaku ekonomi untuk melakukan pertukaran, memperkuat sistem penegakan jika terjadi masalah dalam proses transaksi. Demikian halnya kelembagaan informal yakni menghargai waktu, disiplin, kerja keras, jujur akan mempengaruhi produktivitas.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi seyogianya bisa mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

### **TEROBOSAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS**

Berdasarkan paparan masalah dan analisis di atas, mengerucut pada kebutuhan adanya prioritas sektor ekonomi yang diharapkan berdampak pada perbaikan distribusi pendapatan melalui peningkatan kualitas input sebagai

sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, yakni SDA, SDM, teknologi, finansial, infrastruktur, kelembagaan dan melalui upaya peningkatan investasi serta kebijakan anggaran. Oleh karena itu kami merekomendasikan terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sebagai berikut:

7. Sesuai hasil perhitungan dengan menggunakan Model SAM (Social Accounting Matrices) Jabar, prioritaskan pembangunan sektor pertanian, sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor bangunan dan sub sektor industri makanan dan minuman.
8. Mapping potensi detil dari kelima sektor tersebut dan klasifikasikan arah pengembangannya apakah pertumbuhan, perluasan atau penguatan di setiap wilayah.
9. Optimalkan pemanfaatan SDA, SDM, teknologi, finansial, infrastruktur untuk pembangunan kelima sektor tersebut disesuaikan dengan potensi wilayah.
10. Arahkan investasi swasta dan belanja pemerintah untuk mendorong pengembangan kelima sektor tersebut secara komprehensif. Untuk sektor yang swasta sudah menarik sehingga swasta berebutan masuk, pemerintah tak perlu lagi membelanjakan anggarannya agar tak terjadi *crowding out*. Alokasi anggaran pemerintah yang terbatas harus dilakukan tepat sasaran dan proporsional, lakukan kebijakan keuangan pro rakyat dengan melakukan evaluasi capaian target secara periodik.
11. Percepat reformasi birokrasi dan ubah mind set bahwa karya monumental tidak sebatas fisik, justru sebaiknya pada aspek non fisik.
12. Penguatan lembaga keuangan non-Bank, dan pendidikan kewirausahaan yang kuat.

## MEMORANDUM

---

**KEPADA** : GUBERNUR JAWA BARAT  
**DARI** : KOMITE PERENCANA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT  
**SUBJEK** : **REKOMENDASI PENATAAN DAERAH OTONOM**  
**TANGGAL** : 7 SEPTEMBER 2009  
**CC** : KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

---

Yth. Gubernur Jawa Barat,

Melalui memo ini kami sampaikan rekomendasi tentang penataan daerah otonom.

### TUJUAN MEMO

Memo ini menanggapi rencana penyusunan Grand Design Penataan Daerah Otonom di Jawa Barat tahun 2009 yang sudah dibahas di Komite Perencanaan, yang dianggap masih diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan.

### MASALAH

Berdasarkan informasi yang ada berbagai permasalahan yang memunculkan isu otonomi adalah;

1. Dinamika perkembangan penduduk, arus mobilitas dan dinamika kegiatan perekonomian, Jawa Barat perlu melakukan penataan ulang dalam aspek spasial
2. Belum Terwujudnya pemerataan hasil pembangunan dan kualitas kesejahteraan masyarakat (IPM)
3. Ketidaksetaraan layanan publik di daerah perbatasan baik antar kabupaten /kota maupun antar provinsi.

4. Secara umum kabupaten-kabupaten di Jawa barat memiliki kelemahan dalam faktor kemampuan ekonomi , potensi daerah dan kemampuan keuangan daerah
5. Beberapa daerah menghadapi masalah dalam hal penduduk seperti kabupaten Sumedang, kabupaten Purwakarta, Kota Sukabumi, Kota Cirebon dan kota Banjar.

### **REKOMENDASI SOLUSI PERMASALAHAN**

Perlu menjadi perhatian adalah apakah daerah yang memiliki berbagai permasalahan seperti yang disebutkan diatas, solusinya adalah menjadi daerah otonom? Andaikata memang solusinya otonom maka perlu ada pertimbangan-pertimbangan untuk menghindari keadaan yang lebih buruk dari sebelum menjadi otonom. Beberapa hal yang ditawarkan agar dapat menjawab berbagai potensi permasalahan yang akan dihadapi pasca otonom/ mengurangi munculnya masalah bagi daerah otonom baru adalah dengan mengembangkan Matriks Otonomi yang mencakup;

1. Perlu ditetapkan terlebih dahulu daerah-daerah yang memenuhi syarat menjadi otonom dengan menetapkan beberapa kriteria untuk menjamin kelayakan otonom dengan melakukan Analisa kelayakan Otonom dilakukan terhadap ketersediaan dan kompetensi Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Rencana Keuangan , Fasilitas dan Infrastruktur, Potensi daerah atau menetapkan beberapa *Critical Success Factor* (CSF) yang membuat suatu daerah berhasil/tidak sejak memisahkan diri dari induknya, sebagai *benchmarking* pada saat akan memekarkan suatu daerah /wilayah. Setelah memperoleh pernyataan kelayakan otonom, melengkapi persyaratan administrasi, teknis dll.
2. Mengevaluasi kemajuan daerah-daerah yang sudah otonom.

3. Konsisten terhadap skor CSF, untuk menghindari kejadian seperti Kabupaten Bandung Barat yang nilai kelulusannya sebetulnya "**Tidak mampu**" tetapi dipaksakan meskipun infrastruktur tidak siap .

## MEMORANDUM

---

**KEPADA** : GUBERNUR JAWA BARAT  
**DARI** : KOMITE PERENCANA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT  
**SUBJEK** : **REKOMENDASI PENATAAN SISTEM PASAR TRADISIONAL**  
**TANGGAL** : 20 AGUSTUS 2009  
**CC** : KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

---

Yth. Gubernur Jawa Barat, melalui memo ini kami sampaikan bahwa permasalahan pasar tradisional perlu segera ditangani secara seksama dan komprehensif mengingat peran dan eksistensinya yang semakin menurun dalam perekonomian Jawa Barat.

### TUJUAN MEMO

Memo ini menawarkan terobosan yang dapat dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai penajam dan penyempurna terhadap konsep GEMPITA (Gerakan Perlindungan dan Pengembangan Pasar Tradisional) yang sudah ada, sehingga upaya perlindungan dan pengembangan pasar tradisional segera dapat diimplementasikan. Fokus memo ini adalah merumuskan berbagai solusi yang dapat meningkatkan *performance* dan daya saing pasar tradisional.

### MASALAH PASAR TRADISIONAL

Telah terjadi penurunan daya saing pasar tradisional seiring dengan pesatnya pertumbuhan pasar modern. Teridentifikasi akar masalahnya terkait dengan kondisi fisik dan non-fisik. Secara fisik, citra negatif pasar tradisional diindikasikan oleh becek, kotor, bau, tidak aman, masalah kualitas, standarisasi dan konsistensi jenis produk, fluktuasi harga, daya tahan dan tampilan produk rendah. Masalah non fisik lebih krusial yakni rendahnya kualitas jasa pelayanan pertukaran barang karena belum terpenuhinya standar tata kelola yang modern.

Upaya mengatasi permasalahan pasar tradisional kerap kali dihadapkan pada kegagalan-kegagalan yang berdampak pada semakin terancamnya posisi pasar tradisional. Berdasarkan hasil kajian PSUD ITB 2008, kegagalan penanganan permasalahan pasar tradisional dikarenakan hal-hal berikut ini:

1. Penanganan dilakukan dengan pendekatan *rule government*, yakni pelibatan bersifat formalitas, kurang berpihak kepada pelaku pasar tradisional, kurang memperhatikan konsep pemberdayaan dan penerapan prinsip *good governance*.
2. Konsentrasi dan orientasi revitalisasi pada perbaikan fisik pasar, kurang mempertimbangkan penguatan dan perluasan transaksi serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan.
3. Desain fisik belum mengakomodasikan dinamika transaksi dan perdagangan di pasar, keragaman usaha dan kapasitas pedagang serta perubahan selera, perkembangan kota dan gaya hidup konsumen;
4. Rencana pengembangan belum diposisikan sebagai fungsi komplementer yang saling memperkuat dengan perkembangan pasar modern.

### **ANALISIS**

Dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007, dinyatakan bahwa Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Secara konseptual, pasar adalah jasa pelayanan yang mengkoordinasikan produksi dan konsumsi melalui *voluntary transactions*. Dengan demikian memandang pasar tradisional bukan bentuk (fisik) tapi pada fungsi pertukaran dalam rangka memperoleh *value* atau *gain* baik bagi konsumen maupun produsen. Terdapat 4 elemen keberhasilan sebuah wahana transaksi yakni

kualitas, kuantitas, continuity, dan price. Faktanya, fungsi transaksi di pasar tradisional saat ini terganggu karena tidak terpenuhinya 4 elemen tersebut sebagaimana mestinya.

### **TEROBOSAN PENATAAN SISTEM PASAR TRADISIONAL**

Berdasarkan paparan masalah dan analisis di atas, kami merekomendasikan beberapa terobosan untuk mengatasi masalah pasar tradisional sebagai berikut:

5. Pembatasan, perbaikan, pengembangan dari sudut *demand* dan *supplier*. Misalnya sisi *supplier* membatasi transaksi sayur mayur di super market melalui penetapan pajak atau kuantitas. Memperbaiki dan menata *market chain*, mengatur *supply chain* di pasar tradisional. Pengembangan manajemen jasa pasar tradisional yang mengarah pada standar tata kelola yang modern dan melibatkan potensi lembaga ekonomi yang berbasis pada pemberdayaan para pedagang. Sisi *demand*, perbaikan value pasar tradisional misalnya dengan kebersihan dan peningkatan kualitas pelayanan pertukaran.
6. Pasar tradisional diformat dalam skala tertentu sehingga memiliki kelayakan manajerial.
7. Regulasi pembatasan jumlah dan luasan pasar sesuai daya dukung daerah.

## MEMORANDUM

---

**KEPADA** : GUBERNUR JAWA BARAT  
**DARI** : KOMITE PERENCANA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT  
**SUBJEK** : **TELAAH DAN REKOMENDASI TERHADAP PEMBENTUKAN FOOD CENTER DI PROVINSI JAWA BARAT**  
**TANGGAL** : 24 JUNI 2009  
**CC** : KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

---

Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat, Komite Perencana Bidang Ekonomi telah melakukan dialog dengan Badan Ketahanan Pangan terkait dengan rencana pembentukan Food Center (FC). Memo ini akan memperkaya dan memperkuat konsep FC yang sudah ada sehingga akan menjadi lebih *realible*, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

### **URGENSITAS PEMBENTUKAN FOOD CENTER<sup>i</sup>**

Upaya pembentukan Food Center (FC) didorong oleh fakta permasalahan berikut ini:

- Pemanfaatan sumber daya alam nabati dan hewani untuk kebutuhan pangan masih belum optimal
- Pemanfaatan dan aplikasi teknologi peningkatan produktivitas dalam penanganan dan pengolahan bahan pangan relatif belum berjalan dengan baik
- Optimalisasi sumber bahan pangan belum dilaksanakan secara efisien dan efektif
- Perlu diupayakan secara berkesinambungan pembangunan Ketahanan Pangan secara intensif dan konsekwen, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Optimalisasi para pakar yang berkaitan dengan pangan yang ada di Jawa Barat secara terintegrasi perlu diintensifkan melalui suatu lembaga
- Penggalan potensi sumber bahan pangan di Jawa Barat oleh para ahli melalui penelitian dan pengembangan dengan koordinasi suatu lembaga perlu diintensifkan

- Pemanfaatan potensi sumber bahan pangan di pedesaan relatif belum berjalan secara optimal
- Peristiwa kerawanan dan keamanan pangan di Jawa Barat relatif sering terjadi akibat pemahaman, wawasan, bencana, dan keahlian masyarakat di bidang pangan relatif lemah
- Peningkatan akses pasar para petani terhadap pasar yang berkeadilan, sehingga supply chain pangan Jawa Barat semakin efektif dan efisien terutama untuk pangan strategis.
- Pembentukan pasar yang terorganisasi

Berdasarkan permasalahan di atas maksud dari konsep kelembagaan FC adalah untuk membentuk lembaga yang dapat melaksanakan kegiatan pengkajian, penelitian, pengembangan, dan dokumentasi/publikasi/sosialisasi bidang pangan di Jawa Barat, yang berperan sebagai mitra bagi SOPD yang berkompeten dengan masalah pangan di Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya **Food Center** diharapkan akan memperlancar dan meningkatkan laju pembangunan di bidang ketahanan pangan serta pengoptimalan potensi sumber daya alam sebagai sumber bahan pangan di Jawa Barat untuk berkontribusi di dalam penumbuhkembangan usaha bidang pangan di tingkat nasional, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Disamping tujuan di atas Food Center juga berperan sebagai lembaga yang mampu mengatasi penanganan kerawanan pangan dalam keadaan darurat yang terjadi di masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, termasuk penstabil perniagaan perberasan secara operasional yang langsung berinteraksi baik dengan para pelaku/petani ataupun dengan para pelaku perdagangan bahan pangan/beras.

*Food Center* merupakan suatu organ/lembaga/unit/pusat secara hirarki berada di bawah Pemda Jawa Barat. <sup>1</sup>Peran utama dari food center adalah mengelola logistik pangan strategis, melaksanakan kegiatan pengkajian, penelitian, pengembangan, dan dokumentasi/publikasi/sosialisasi tentang potensi pangan, serta menangani kerawanan pangan termasuk penstabil perniagaan perberasan secara operasional di Jawa Barat. Sedangkan status *Food Center* adalah merupakan mitra/partner bagi Satuan Organisasi

Perangkat Daerah (SOPD) dan Badan-badan yang berkompeten di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota berikut :

- Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD),
- Badan Perencanaan Daerah (Bapeda)
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
- Dinas Pertanian tanaman Pangan,
- Dinas Peternakan,
- Dinas Perikanan dan Kelautan,
- Dinas Perkebunan,
- Dinas Kesehatan,
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan,
- Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah,
- Dinas Tenaga Kerja,
- Dinas Sosial,
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
- Dinas Tata Ruang dan Pemukiman,
- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air,
- Dan SOPD yang berkompeten lainnya

*Food Center* Juga berperan sebagai mitra bagi lembaga-lembaga lainnya seperti PKK, LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Kamar Dagang dan Industri, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, para pelaku usaha bidang pangan, asosiasi yang terkait, dan lain sebagainya. Kemitraan (*Partnership*) tersebut yaitu dimaksudkan untuk memperlancar dan meningkatkan laju pembangunan di bidang ketahanan pangan serta pengoptimalan potensi sumber daya alam sebagai sumber bahan pangan di Jawa barat. Adapun porsi peran antara Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) dengan Food Center (FC), bahwa peran utama BKPD yaitu melaksanakan kebijakan sebagai tugas koordinasi dan konsolidasi dengan SOPD terkait dalam mengimplementasikan dan merealisasikan dengan mengadopsi hasil-hasil kegiatan FC.

## **TELAAH DAN REKOMENDASI KOMITE PERENCANA PEMBANGUNAN TERHADAP KONSEP FOOD CENTER**

Bidang Ekonomi KP memandang Food Center (FC) sebagai "semangat", "forum mediasi", "kelembagaan" atau "praktis" yang harus sesuai dengan "will" dan "need". Penajaman atas "standing position" FC harus kontekstual dalam 'sistem pangan' dan 'sistem ketahanan pangan' Jawa Barat.

Kristalisasi makna FC merupakan hal mendasar dalam sebuah kelembagaan. Peran pemerintah provinsi dalam bidang pangan strategis terutama upaya logistik dari kacamata kepentingan dan sumber daya yang ada di di Jawa Barat belum ada institusi yang melakukan.

Berdasarkan elaborasi dan analisa terhadap konsep FC yang ada, kami memiliki pandangan sebagai berikut ini:

1. FC sebaiknya tidak difungsikan sebagai badan yang akan melaksanakan kegiatan pengkajian, penelitian, pengembangan, dan dokumentasi/publikasi/sosialisasi bidang pangan di Jawa Barat. Kegiatan litbang pangan sebaiknya dioptimalkan di bawah SOPD (Badan Ketahanan Pangan) atau Dewan Ketahanan Pangan Daerah atau di bidang penelitian BAPPEDA
2. Terkait dengan keberadaan FC untuk penumbuhkembangan usaha bidang pangan di tingkat nasional, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, maka Food center harus diarahkan sebagai lembaga bisnis yang otonom (PT, Perum, BUMD, Koperasi) yang memainkan peran sebagai "Bulog" Jabar.
3. Food center adalah lembaga yang concern terhadap pangan strategis masyarakat Jawa Barat, yang akan menampung dan menyalurkan hasil pertanian rakyat, menjaga ketersediaan/stock dan stabilitas harga, unit bisnis yang berpihak pada rakyat (petani dan konsumen).
4. Tanggungjawab dan cakupan operasional lebih dari sekedar masalah ketahanan pangan. Kiprah FC seyogianya focus pada sisi produsen (petani), produk dan konsumen. Keberadaan FC akan memberikan alternatif bagi petani untuk mengakses pasar yang ditata lebih baik. Kemudahan bagi petani melancarkan *supply chain* di Jawa Barat terhadap pasar regional maupun international. Dengan pasar tertata maka diharapkan instrumen-instrumen keuangan dapat

masuk dalam sektor agribisnis ke hulu maupun hilir lebih mudah, sehingga posisi tawar petani akan naik dalam percaturan bisnis agro.

5. Terkait dengan aspek produk, keberadaan FC hendaknya mampu menaikkan posisi logistik Jawa Barat dan mengembangkan aneka pangan strategis Jawa Barat berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan pangan strategis yang dilakukan SOPD terkait.
6. Tanggung jawab FC pun sampai pada sisi konsumen, yakni lancarnya saluran distribusi ke konsumen.
7. Dengan cakupan tanggungjawab dan operasional yang begitu luas, maka perlu mapping stakeholder mengenai analisa kepentingan dan potensi konflik inter dan antar stakeholder. Kemudian perlu ada analisa mengenai matriks kinerja sosial berkaitan dengan mapping tersebut, apakah keberadaan Food Center ini akan bersinergi atau malah sebaliknya.
8. Seyogianya, Food Center tidak sekedar bersinergi dengan Dewan Ketahanan Pangan dan Badan Ketahanan Pangan, namun juga dengan OPD-OPD lainnya yang terkait. Bahwasannya, keberadaan FC harus mampu mengaitkan simpul-simpul dari setiap stakeholder.
9. Keberadaan FC di tingkat provinsi menuntut peran yang proporsional, bahwa provinsi lebih pada fasilitasi. Provinsi seyogianya mampu mendorong kabupaten/kota untuk membuat mapping stakeholder tersebut.
10. Dalam Kajian Konsepsi Pengembangan Food Center selanjutnya, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:
  - Keterkaitan FC dengan 'sistem pangan' dan 'sistem ketahanan pangan' Jawa Barat.
  - Peta potensi peran dan kontribusi dari setiap stakeholder sehingga dapat dipahami saling keterkaitan dan ketergantungannya.
  - Rumusan mekanisme dan sistem tata kelolanya.
  - Key Factor Indicators.

## MEMORANDUM

---

**KEPADA** : GUBERNUR JAWA BARAT  
**DARI** : KOMITE PERENCANA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT  
**SUBJEK** : **REKOMENDASI PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS  
KEPENDUDUKAN**  
**TANGGAL** : 20 AGUSTUS 2009  
**CC** : KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

---

Yth. Gubernur Jawa Barat, melalui memo ini kami sampaikan bahwa pembangunan ekonomi berbasis kependudukan perlu dipertegas mengarah pada peningkatan akumulasi human capital dalam rangka mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

### TUJUAN MEMO

Memo ini menawarkan terobosan yang dapat dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan upaya mengedepankan kependudukan sebagai basis pembangunan dari sudut pandang ekonomi.

### MASALAH KEPENDUDUKAN JAWA BARAT

Jawa Barat dihadapkan pada permasalahan kependudukan yang sangat kompleks mencakup multi aspek dan dimensi yakni permasalahan kuantitatif, kualitatif, dan distribusi. Teridentifikasi determinan masalah kuantitatif diantaranya pertumbuhan di atas pertumbuhan nasional, angka kepadatan kota tertinggi secara nasional, pertumbuhan non-alami sangat tinggi. Permasalahan kualitatif sebagai cerminan kualitas SDM lebih memprihatinkan karena rendahnya angka partisipasi pendidikan pasca SD, rendahnya angka rata-rata lama sekolah, relevansi pendidikan dengan tuntutan, daya saing dan mutu pendidikan. Sedangkan masalah distribusi terkait dengan ketimpangan jumlah dan kualitas SDM di utara/tengah dan selatan, ketimpangan jumlah dan kualitas

SDM di perdesaan dan perkotaan, dukungan administrasi kependudukan. Dari kompleksitas permasalahan ini tampaknya masalah kualitas merupakan prioritas penanganan dalam rangka menempatkan penduduk sebagai subyek pembangunan.

### **ANALISIS**

Kajian kependudukan dalam perspektif Teori Klasik yang dipersempit menjadi labor/tenaga kerja merupakan input (faktor produksi) dalam menghasilkan output. Sedangkan dalam New Growth Theory, dikembangkan menjadi human capital sebagai penentu technological progress, sehingga positioning penduduk menjadi subyek dan modal pembangunan, memiliki produktivitas tinggi, dan sebagai asset. Konsekuensinya, bagaimana membentuk **human capital** yang tinggi, memanusiakan manusia, meraih people prosperity yakni SDM yang berkualitas, memiliki tingkat pendidikan dan skill yang tinggi, jiwa entrepreneur, dan kehidupan yang layak. Di sinilah nampak korelasi antara human capital dan daya beli.

### **TEROBOSAN PENINGKATAN AKUMULASI *HUMAN CAPITAL***

Berdasarkan paparan masalah dan analisis di atas, kami merekomendasikan beberapa terobosan untuk meningkatkan akumulasi human capital sebagai berikut:

- Human capital yang dimunculkan idealnya selaras dengan struktur sosial ekonomi yakni optimalisasi jumlah penduduk dan level ekonominya (peningkatan skill TK lokal), berdaya saing dengan orientasi nasional dan luar negeri (mendorong TK keluar Jawa Barat), ditopang *long life learning*.
- Reformasi ekonomi untuk mencapai human capital, yakni optimalisasi potensi lokal melalui pendirian center pendidikan bisnis, merumuskan content pendidikan pendukung keahlian, perbaiki akses pasar, perbaiki jalan/infrastruktur, meraih investor yang paham dengan kondisi lokal.

- Dalam rangka peningkatan daya saing TK harus dilakukan mapping demand (market oriented), market dan customer driven, mendorong berkembangnya jasa pencipta tenaga kerja orientasi pasar luar Jabar yang dapat memenuhi indeks standar keahlian yang dibutuhkan.
- Akumulasi human capital merupakan proses agregasi aspek pendidikan, pelatihan, pembelajaran yang melibatkan banyak pihak terkait sehingga dibutuhkan adanya kelembagaan yang mengatur kependudukan tidak sebatas administrasi tapi sampai pada pembentukan human capital.

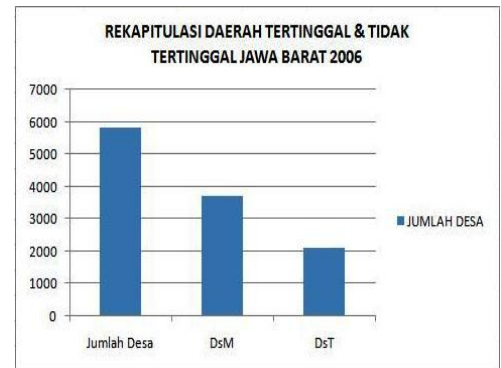
## MEMORANDUM

**KEPADA** : GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT  
**DARI** : KOMITE PERENCANA PROVINSI JAWA BARAT  
**SUBJEK** : REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DI JAWA BARAT  
**TANGGAL** : 13 APRIL 2008  
**CC** : KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat,

Sebagaimana menjadi perhatian bapak akhir-akhir ini bahwa pembangunan perdesaan di Jawa Barat merupakan hal yang memerlukan perhatian mendalam, mengingat penduduk Jawa Barat yang berjumlah 41.483.729 jiwa (data tahun 2007), 55% berada di perdesaan dan dari 10 juta penduduk miskin Jawa Barat, 60% berada di desa.

Saat ini terdapat 5.808 wilayah yang termasuk dalam klasifikasi desa di Provinsi Jawa Barat, dan sekitar 2.107 dari desa-desa tersebut masih tergolong tertinggal. Desa-desa tersebut, terutama desa yang tertinggal, masih diliputi oleh permasalahan sosial seperti kesehatan, tingkat pendidikan dan daya beli yang rendah.



Kondisi pembangunan desa saat ini masih sangat bergantung kepada bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Program Pembangunan oleh pemerintah daerah yang sudah dilaksanakan berbasis desa hingga saat ini diantaranya adalah Raksa Desa, PPK-IPM, Bantuan Kinerja Pemerintahan Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, serta Program sektoral dari berbagai OPD.

Model Pembangunan perdesaan saat ini memiliki keinginan untuk mewujudkan 2.026 Desa Mandiri Mitra Perkotaan; 95 Desa untuk perwujudan

Desa Mandiri Lingkungan; 1.851 Desa untuk perwujudan Desa Mandiri Ekonomi; serta 1.836 Desa Mandiri Perkotaan.

## **TUJUAN MEMO**

Melalui memo ini kami ingin memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan perdesaan yang sebaiknya diterapkan di Provinsi Jawa Barat. Fokus penyusunan memorandum ini adalah pada pembangunan perdesaan yang menyeluruh, sesuai dengan karakter serta potensi dari masing-masing desa.

Rekomendasi ini dibuat dengan mengacu kepada Perda Prov. Jawa Barat No. 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; serta Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.

## **PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DI JAWA BARAT**

Dalam konteks pembangunan perdesaan, permasalahan yang terkait adalah lingkup budaya, sosial kependudukan, sosio-ekonomi perdesaan, tata ruang wilayah Jawa Barat dan lingkup administrasi pemerintahan desa. Secara eksplisit permasalahan dalam pembangunan perdesaan tersebut antara lain;

1. Masyarakat desa umumnya tidak memiliki visi untuk membangun desanya sendiri. Desa dianggap sebagai tempat tertinggal tanpa keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup.
2. Minimnya dukungan infrastruktur, kepemilikan lahan yang terbatas, budidaya yang kurang mendapat *value added*, keterisolasian desa karena aksesibilitas, akses pasar yang sulit.
3. Kondisi geografis Jawa Barat yang sangat variatif menyebabkan sulitnya persebaran sarana dan prasarana yang dibutuhkan desa serta mungkin salah sasaran dalam penyediaan fasilitas.
4. Kapabilitas aparat pemerintahan desa masih rendah. Aparat pemerintah desa belum bisa mengarahkan masyarakat menuju

pembangunan desa yang lebih baik, serta tidak melakukan pengelolaan terhadap pembangunan yang telah terlaksana.

5. Desa di Jawa Barat tidak memiliki kejelasan akan klasifikasi yang sesuai terhadap karakternya. Akibat dari tidak jelasnya pengklasifikasian desa adalah pembangunan di desa, baik fisik maupun mental, tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
6. Banyak program dan dana yang sudah digulirkan untuk desa baik APBN maupun APBD, belum menghasilkan sosok pembangunan desa yang kemajuannya bersifat terukur dengan indikator tertentu.

## **ANALISIS**

Rapat Komite Perencana dengan melibatkan dinas-dinas yang terkait menganalisis dan menangkap permasalahan yang disebutkan di atas dan merasa bahwa perencanaan pembangunan di desa harus segera dilakukan agar mampu memunculkan sosok desa yang sesungguhnya, yaitu:

1. Desa memiliki jati diri karakteristik filosofi dan nilai luhur budaya lokal yang dikemas ke dalam *grand design* pembangunan desa;
2. Profil desa minimal memiliki prasyarat dasar, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, sarana ibadah, pasar, sarana pendidikan, pusat kesehatan, tempat pertemuan dan ruang terbuka hijau;
3. Desa berada pada posisi satu kesatuan pembangunan Jawa Barat, dengan demikian sebuah desa berada pada klaster desa sesuai potensi dan letak geografis desa;
4. Desa memiliki otonomi dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi terhadap kegiatan pembangunan Jawa Barat;
5. Desa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan ekonomi, sosial dan religi, dengan mengarahkan pembangunannya sendiri dan merupakan bagian pembangunan Jawa Barat secara utuh.

6. Aparat pemerintahan desa memiliki kompetensi untuk membantu masyarakat desa menentukan arah pembangunan desa, termasuk mampu memetakan kebutuhan masyarakat sehingga pemberian bantuan dari pemerintah daerah tepat sasaran.

Tentunya sosok desa yang disebutkan di atas harus sesuai dengan karakteristik dari masing-masing desa. Sesuai potensi dan letak geografisnya, maka desa-desa ini dapat diklasterkan ke dalam 4 klaster yang tetap mengacu pada satu kesatuan pembangunan Jawa Barat yang utuh, yaitu:

1. *Desa Kawasan Lindung*, adalah desa yang terletak di dalam dan di tepi kawasan hutan, di pantai, di daerah rawan bencana, yang ditata untuk melakukan fungsi kelestarian alam dan lingkungan.
2. *Desa Kawasan Sentra Produksi*, adalah desa yang terletak di sentra produksi baik pertanian maupun non-pertanian dengan perkembangan yang ditata untuk kepentingan ekonomi Jawa Barat. Desa ini memiliki variabel lahan non-pertanian  $\leq 0,5$  luas desa.
3. *Desa Pinggiran Perkotaan*, adalah desa yang terletak di pinggiran kota dengan perkembangan yang ditata sebagai mitra kelurahan di kota dari berbagai aspek. misal: tenaga kerja, ekonomi, sosbud, dan lain sebagainya. Desa ini memiliki variabel lahan non-pertanian  $\geq 0,5$  luas desa.
4. *Desa dan Kelurahan Bertipe Perkotaan*, adalah desa dan kelurahan dengan karakteristik perkotaan yaitu yang penduduknya memiliki kegiatan utama bukan pertanian, kepadatan penduduk kurang dari 5.000 jiwa/km<sup>2</sup> dan memiliki fasilitas umum minimal 8 dari 16 fasilitas kota seperti SD, SLTP, SMU, Bioskop, dan lainnya.

Setiap desa di Jawa Barat harus di klasifikasikan ke dalam salah satu klaster desa seperti yang disebutkan di atas. Penentuan klaster dari tiap desa dapat membantu penentuan arahan pembangunan desa sesuai dengan potensinya, sehingga desa dapat berkembang dengan semestinya.

Selain penggolongan desa menjadi empat klaster seperti yang disebutkan di atas, pembangunan desa juga perlu dilakukan secara bertahap agar pembangunan desa berkesinambungan dengan rencana yang telah ditetapkan

pada wilayah yang lebih luas. Tahapan pembangunan desa adalah sebagai berikut:

- Tahap I : Harmonisasi skema RPJPD dan RPJMD terintegrasi dengan grand design pembangunan perdesaan.
- Tahap II : Restrukturisasi kegiatan OPD berorientasi desa membangun sebagai kelompok sasaran.
- Tahap III : Sinergitas, integrasi dan peran serta swasta di desa dengan program kegiatan pemerintah desa dan tugas pembantuan.
- Tahap IV : Integrasi tata ruang nasional, regional, daerah dan perdesaan.
- Tahap V : Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh.

### **REKOMENDASI KOMITE PERENCANA**

Berdasarkan hasil analisis dan setelah melalui berbagai tahapan diskusi, Komite Perencana mengajukan beberapa rekomendasi pembangunan desa menuju sosok perdesaan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

#### **1. KONSEPSI PEMBANGUNAN PERDESAAN:**

Berikut adalah konsepsi pembangunan desa yang direkomendasikan oleh Komite Perencana.

##### a. Pola pembangunan:

- i. **Membangun Desa:** pola pembangunan perdesaan dan prioritas pembangunannya yang dirancang berbasiskan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di desa.
- ii. **Desa Membangun:** pola pembangunan perdesaan dan prioritas pembangunannya yang dirancang berbasiskan evaluasi diri suatu desa berkaitan dengan potensinya, kondisi geografis, serta kaitannya dengan desa yang berdekatan, kecamatan, hingga ke kabupaten/kota.

- b. Penyusunan klaster desa dibagi ke dalam empat jenis klaster, yaitu:
- i. Desa pinggiran perkotaan,
  - ii. Desa kawasan lindung,
  - iii. Desa kawasan sentra produksi dan
  - iv. Desa serta kelurahan perkotaan.

Seluruh klaster akan mendapatkan program peran serta yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan target sosok desa mandiri yang ingin dicapai.

## 2. PROGRAM PEMBANGUNAN PERDESAAN:

Program pembangunan desa direkomendasikan oleh Komite Perencana sesuai dengan konsepsi pembangunan desa sehingga terjadi kesinambungan. Program pembangunan dilaksanakan dengan penggabungan kedua konsep pembangunan desa.

- a. Mengalokasikan Dana Alokasi Desa (DAD) Provinsi Jawa Barat berbasis klaster desa dan evaluasi dirinya (**dengan Konsep Desa Membangun**) berpola *matching grant* dengan APBD Kab./Kota;
- b. Pemenuhan infrastruktur dasar dari dana selain DAD (**dengan Konsep Membangun Desa**): SD/MI, SMP/MTs, perpustakaan desa, puskesmas pembantu, instalasi air bersih, instalasi air kotor, tempat pembuangan sampah sementara, dan MCK, jalan poros desa, pasar desa, sistem irigasi/tambatan perahu, listrik/energi perdesaan, dan sarana peribadatan.

## 3. MANAJEMEN PERDESAAN:

Manajemen perdesaan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Program pembangunan tidak akan terlaksana dengan maksimal tanpa adanya manajemen yang baik. Tentunya SDM lokal haruslah kompeten dan berkemampuan melaksanakan pengelolaan. Komite

Perencana mengajukan tiga rekomendasi untuk manajemen perdesaan sebagai berikut:

- a. *Capacity building* aparatur perdesaan dalam skema Desa Membangun.
- b. Penempatan OPD Provinsi Jawa Barat ke dalam skema Membangun Desa dengan bekerjasama dengan OPD kabupaten/kota.
- c. Membuat payung hukum:
  - i. Membuat MoU antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bupati/Walikota tentang Skema Desa Membangun yang mengacu kepada RPJMD dan RPJPD
  - ii. Peraturan Gubernur tentang Skema Desa Membangun

#### **4. KEUANGAN:**

Berikut adalah rekomendasi keuangan yang disesuaikan dengan rekomendasi diatas:

- a. Mengalokasikan DAD (konsep Desa Membangun) dari APBD yang berpola *matching grand* dengan APBD kab/kota.
  - b. Mengalokasikan anggaran bantuan provinsi yang diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar.
  - c. Memobilisasi potensi dana lainnya (Non APBD).
-

Filename: MEMO-Gabung Ekonomi  
Directory: C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Bahan  
Sosialisasi KP 2009\Kumpulan Memo Pokja KP\Memo Final Pokja Ekonomi  
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title: MEMORANDUM  
Subject:  
Author: SONY  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 12/23/2009 8:16:00 PM  
Change Number: 5  
Last Saved On: 12/23/2009 8:27:00 PM  
Last Saved By: User  
Total Editing Time: 12 Minutes  
Last Printed On: 12/23/2009 8:28:00 PM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 37  
Number of Words: 7,437 (approx.)  
Number of Characters: 42,397 (approx.)